

Pengaruh Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2021

**Ni Kadek Puspita Dewi⁽¹⁾
I Made Endra Lesmana Putra⁽²⁾**

^{(1),(2)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia,
Tembau, Jalan Sangalangit, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur Bali
Email: kadekpuspita21@gmail.com

This research was conducted to learn how Badung Regency's regional taxes and regional levies affect the region's budget. The tests of normality, correlation, multicollinearity, heteroscedasticity, and multiple linear regression used here are all part of the more traditional statistical methodology. During the period from 2017 to 2021, a total of 180 samples will be collected. This will include 60 samples of Regional Original Income, 60 samples of levies, and 60 samples of regional taxes. As a result, we found: The Regional Original Income in Badung Regency increases significantly as a result of retribution. This outcome suggests that Regional Original Income in Badung Regency would rise along with the increase in levies. Badung Regency's Regional Original Income benefits significantly from regional taxes. These findings imply that the administration of Badung Regency might expect a larger share of the Regional Original Income if the Regional Tax in that region is raised to greater levels.

Keywords: Regional Levies, Regional Taxes, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Ada korelasi langsung antara ketersediaan sumber keuangan dan kecepatan pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintah daerah. Pembiayaan dipakai dalam melakukan ataupun mengaktualisasikan otonomi daerah yang timbul dari kemampuan daerah, ditunjukkan terdapatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

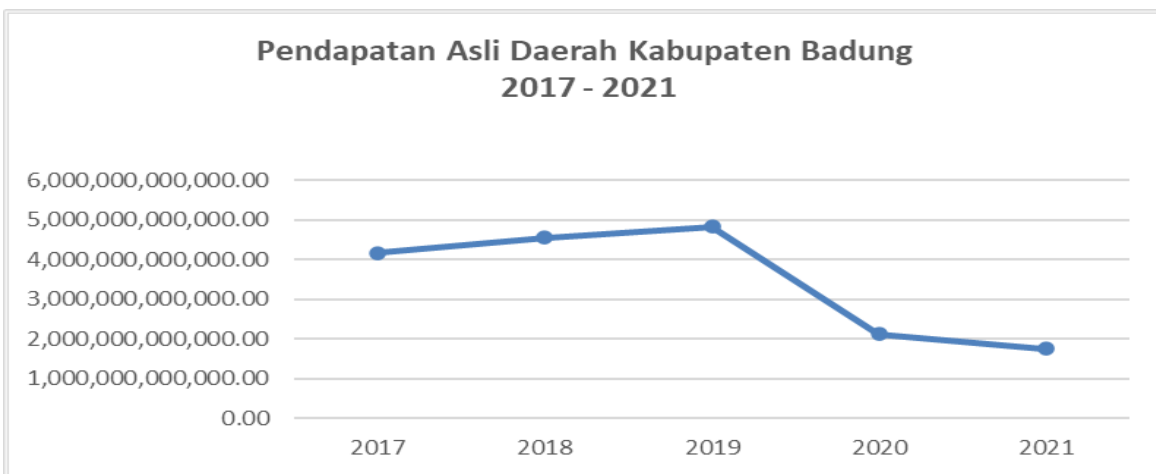
PAD didapat dalam suatu wilayah sesuai peraturan pada perundang-undangan daerahnya, seperti tertuang pada UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat serta Daerah. PAD yakni jumlah seluruh pemasukan yang sah yang dihasilkan di suatu daerah, termasuk pajak, retribusi, dan keuntungan dari pengelolaan kekayaan daerahnya yang dilaksanakan orang pribadi.

Retribusi daerah termasuk penyumbang utama PAD. Retribusi Daerah memperhitungkan pemberian satu jasa ataupun izin yang khusus yang diberikan khusus dari pemerintahan daerah untuk pemberlakuan retribusi daerah, seperti pada UU No 28 Tahun 2009. Komponen penting lainnya didalam penerimaan PAD yakni pajak suatu daerah. Berlandaskan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah, “pajak daerah (selanjutnya disebut pajak) yakni wajib atau diwajibkan oleh orang perseorangan atau badan hukum untuk membayar kepada daerah yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa atau badan hukum untuk membayar kepada daerah yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa tanggapan langsung.”

Kabupaten Badung termasuk satu dari daerah yang paling makmur di Provinsi Bali. PAD di tahun 2021 menyentuh Rp. 1.750.450.712.030,68 yang termasuk 86,40% dari target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.972.103.054.321.00, yang turun dari tahun sebelum yang terlihat dari grafik PAD.

Grafik 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

Grafik 1.1 menunjukkan bahwasanya meskipun PAD Kabupaten Badung terus meningkat pada tahun 2017 hingga 2019, namun turun tajam pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini karena wabah Covid-19 telah menghalangi penghimpunan sumber PAD yang ideal, yang menyebabkan realisasi PAD yang sudah ada kurang dari yang diharapkan. I Nyoman Giri Prasta, Bupati Badung, menyatakan pada tahun 2021 terjadi penurunan PAD yang cukup signifikan, terutama dari pajak hotel serta restoran yang jadi sumber dari pendapatan yang utama, karena turunnya jumlah wisatawan mancanegara bahkan domestik yang melakukan kunjungan ke Badung. Kabupaten/Kota sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Karena wabah virus corona dan pembatasan aktivitas masyarakat yang diakibatkannya, pemerintah daerah tidak bisa memungut denda dan retribusi. Berbeda dengan sumber pendapatan lain di daerah, retribusi semakin penting (www.baliprawara.com, 2021). Akibat meluasnya kerusakan akibat wabah Covid-19 pada tahun 2020, PAD di Kabupaten Badung akan berfluktuasi antara tahun 2017 hingga 2021.

Tujuan studi yakni untuk mengetahui bagaimana dampak PAD terhadap dana APBD Kabupaten Badung untuk pelayanan daerah. Tujuan lainnya yakni mengetahui dampak pajak Kabupaten Badung terhadap anggaran daerah. Temuan studi ini harus meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana berbagai jenis retribusi daerah dan pajak daerah mempengaruhi anggaran negara bagian dan kota. Temuan studi ini diharapkan bisa menjadi ide dan referensi lebih lanjut untuk evaluasi kinerja instansi terkait.

KAJIAN PUSTAKA

1. Stewardship Theory

Menurut (Donaldson dan Davis, 1991) *Stewardship theory* Ini tergambar lingkungan di mana keputusan manajerial dibuat bukan dari ambisi pribadi melainkan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan organisasi. Penelitian di bidang akuntansi bisa mengambil manfaat dari teori penatagunaan ketika mempelajari entitas sektor publik seperti pemerintah dan organisasi nirlaba. Keberhasilan dalam bisnis diasumsikan memiliki korelasi langsung dengan kebahagiaan karyawan dalam pengertian ini.

2. Pendapatan Asli Daerah

Dijelaskan UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, “pendapatan asli daerah atau selanjutnya disebut PAD dipungut berdasarkan pendapatan daerah yang ada dengan peraturan perundang-undangan.”

3. Pajak Daerah

Bagi UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, yakni kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

4. Retribusi Daerah

Dijelaskan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, “retribusi daerah yakni pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

H1; Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung

Di antara sekian banyak aspek PAD, hukuman daerah memainkan peran yang cukup signifikan dalam aktualisasi otonomi daerah untuk menghasilkan uang daerah. Diperkirakan bahwasanya iuran pengguna lokal akan meningkat sebagai akibat dari keterlibatan masyarakat dalam membayarnya. Akibatnya terjadi korelasi diantara retribusi daerah dan PAD, sehingga makin besarnya jumlah uang retribusi daerah, akibatnya PAD juga semakin meningkat. Studi lainnya (I Putu Agus Sudarmana & Gede Mertha Sudiarta, 2020) berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah.” Yang hasilnya “retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung.”

H2; Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung

Menaikkan pajak daerah yakni cara tertentu guna peningkatan pendapatan daerahnya, yang sangatlah penting untuk mendanai pemerintah daerah dan pembangunan. Akibatnya, terdapat korelasi diantara pajak daerah dan pendapatan daerahnya, yakni bila pendapatan pajak daerah tumbuh akibatnya pendapatan daerah juga meningkat. Penelitian terdahulu (Siti Nur Khayati ,2022) meneliti “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Dan Kabupaten Bantul.” Yang mana Hasilnya “Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.”

METODE PENELITIAN

Peneliti memakai teknik kuantitatif untuk menguji pengaruh indikator retribusi daerah serta pajak atas PAD. Untuk keperluan analisis ini, retribusi, pajak daerah, dan pendapatan daerah termasuk populasi penelitian. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Badung termasuk sumber utama untuk semua variabel. Data yang dipakai pada analisis ini dikumpulkan secara bulanan dari Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Badung dan mencakup PAD, retribusi, sert pajak dari Januari 2017 hingga Desember 2021/22. Penelitian ini, kami menerapkan Uji Asumsi Klasik sert Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengevaluasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam Pemeriksaan ini, pengujian yang dipakai diantaranya:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan guna mengecek bahwasanya model

yang dibuat terdistribusi normal ataupun tidak. Model regresi yang relevan yaitu data yang terdistribusi wajar maupun menuju wajar. Pada kajian ini, guna menguji apakah model yang dipakai sudah wajar ataupun belum, dilaksanakan memakai pengujian *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian normalitas kajian ini bisa dicek di Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000369
	Std. Deviation	69307178504,76297000
Most Extreme Differences	Absolute	,200
	Positive	,200
	Negative	-,169
Kolmogorov-Smirnov Z		,200
Asymp. Sig. (2-tailed)		,125 ^c

Source: Pengolahan data sekunder

Angka Asymp. Sig (2-tailed) pada tabel 1 menunjukkan $> level\ of\ significance$ 0,05, maka disimpulkan jika residual sebuah data bisa didefinisikan berdistribusi secara wajar.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan guna mengerti bahwasanya bentuk kemunduran linier ada kesesuaian dimana residual saat periode t serta residual saat waktu t-1. Bentuk regresi yang bagus ialah kemunduran yang lepas dari autokorelasi (Ghozali, 2016). Bila terdapat korelasi, diperkirakan terdapat masalah autokorelasi. Pengujian ini dilaksanakan memakai Uji Durbin-Watson. Data *Autocorrelation Test* kajian ini bisa dicek pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,893 ^a	0,798	0,791	70512611108,60892	2,146

a. Predictors: (Constant), Retribusi (XI), Pajak Daerah (X2)
 b. Dependent Variable: PAD (Y)

Source: Pengolahan data sekunder

Pengujian Uji Durbin-Watson yang tertera di tabel 2 didapat nilainya

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Retribusi (X1)	,316	3,168
	Pajak Daerah (X2)	,316	3,168

Sumber: data sekunder yang diolah

Pengujian Multikolinearitas pada tabel nomor 4 didapat angka *Tolerance* tiap indikator >0,10 serta bila angka VIF tiap indikator.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Dilakukannya *multiple linear regression analysis* memiliki maksud guna menilai indikator bebas terhadap indikator terikat.

- a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yakni lebarnya sumbangsiah indikator bebas terhadap indikator terikatnya. Jika semakin panjang *coefficient of determination*, turut panjang juga kapabilitas indikator bebas dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap indikator terikatnya. Nilai koefisien determinasi ialah rentang nol hingga satu (Ghozali, 2016). Hasil *Coefficient of determination test* kajian ini bisa dicek di Tabel nomor 5:

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,893 ^a	,798	,791	70512611108,60892	2,146

a. Predictors: (Constant), Retribusi (X1), Pajak Daerah (X2)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Sumber: data sekunder yang diolah

Menurut tabel 5 tersebut, diperoleh *adjusted R Square* yakni senilai 0,791. Angka tersebut didefinisikan 79,1% Retribusi dan Pajak Daerah secara

(bersamaan) memengaruhi PAD sedangkan 20,9% terpengaruh faktor lainnya.

b. Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian statistik F dengan tujuannya menilai faktor otonom yang dimaksud pada model memiliki dampak atau tidak dengan serempak kepada variabel terikat. Data Pengujian Simultan (Uji F) kajian ini terlihat di Tabel 6:

Tabel 6. Hasil Pengujian Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11197734731034 16600000000,000	2	559886736551708 300000000,000	112,61	,000 b
	Residual	28340561454517 3350000000,000	57	4972028325353918000 000,000		
	Total	14031790876485 90000000000,000	59			

a. Dependent Variable: PAD (Y)

b. Predictors: (Constant), Retribusi (X1), Pajak Daerah (X2)

Sumber: data sekunder yang diolah

Menurut tabel nomor 6, diketahui besaran signifikansi F pada tabel yakni 0,000. Angka signifikansi $F = 0,000 < \alpha = 0,05$ lalu dasar penetapan keputusan pada uji F bisa ditarik kesimpulan bahwa retribusi dan pajak daerah secara serempak berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah.

a. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilaksanakan guna mengetahui tiap hipotesis maupun dampak secara parsial (per variabel bebas) kepada variabel terikat (Ghozali, 2016:98). Data Uji hipotesis (Uji t) kajian ini bisa dicek di Tabel 7:

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2545246	20193672		1,26	,213
		4308,921	256,290			
	Retribusi (X1)	8,605	3,431	,266	2,508	,015
	Pajak Daerah (X2)	,794	,127	,661	6,238	,000

Sumber: data sekunder yang diolah

Menurut tabel output, mampu terlihat nilai Uji t pada tabel 7 yakni nilai sig <0,05 Dengan menggunakan uji-t sebagai dasar penarikan kesimpulan, bisa dikatakan bahwasanya “pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama memberi kontribusi signifikan pada PAD.”

Pengaruh Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung

Dijelaskan pada H1 menyatakan bahwasanya “retribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.” Temuan regresi linier berganda menunjukkan bahwasanya hukuman tidak berbeda nyata dengan peluang (0,05). Hasil terlihat bahwasanya “hukuman berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah”, sehingga H0 bisa diterima. Penelitian lainnya (I Putu Agus Sudarmana & Gede Mertha Sudiarta, 2020) berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah.” Hasilnya “retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung”

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung

Hipotesis kedua (H2) mengatakan bahwasanya “pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.” Pajak daerah tidak berbeda nyata dengan nol, menurut hasil uji regresi linier berganda (0,05). Pajak daerah memengaruhi PAD secara positif signifikan, sesuai dengan hasil pengujian, maka hipotesis 2 diterima. Penelitian terdahulu (Siti Nur Khayati ,2022) meneliti “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Dan Kabupaten Bantul.” Yang mana Hasilnya “Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.”

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai Hasil diatas mengenai dampak dari pengretribusiian serta pajak dalam daerah terhadap PAD memberikan beberapa simpulan sebagai berikut

1. Penelitian ini terlihat bahwasanya memengaruhi PAD di Kabupaten Badung dengan positif signifikan. Dengan demikian, PAD di Kabupaten Badung naik, begitu juga dengan pajaknya.

2. Penelitian ini terlihat bahwasanya Pajak Daerah memengaruhi PAD Kabupaten Badung dengan positif signifikan. Pemerintah Kabupaten Badung akan mendapatkan PAD yang lebih besar sebanding dengan besarnya Pajak Daerah yang dipungut.

Usulan yang mampu dibagikan pada kajian ini menurut hasil bersama pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Badung diperhitungkan untuk berpikir di luar kotak dan menghasilkan pendekatan baru saat mereka menyelidiki potensi pendapatan daerah yang belum dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah bisa menurunkan pajak yang dibayarkan oleh industri perhotelan, makan, dan hiburan serta garasi parkir. Selanjutnya, pemerintah daerah bisa melepaskan atau mengurangi Pajak Perolehan Hak terhadap Tanah serta Bangunan.
2. Bagi penelitian selanjutnya wajib menggunakan faktor tambahan seperti hasil dari badan usaha yang dimiliki suatu wilayah, dan juga hasil dari aset suatu wilayah yang diolah, PAD lainnya yang sudah resmi, serta memanfaatkan data tahunan sehingga ada pemutakhiran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali prawara. 2022. Badung Terapkan Prinsip Kehati Hatian Menyusun Proyeksi-Apbd Tahun Anggaran 2022.<https://www.baliprawara.com/badung-terapkan-prinsip-kehati-hatian-menyesusun-proyeksi-apbd-tahun-anggaran-2022/>
- Ghozali, Imam. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Monalisah. 2020. *Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018. Undergraduate thesis*, IAIN Padangsidempuan.
- I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta. 2020. *Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008-2018*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana. Vol 9 No 4.
- Khayati, Siti Nur. 2022. *Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Dan Kabupaten Bantul)*. Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi.
- Puja Rizqy Ramadhan. 2019. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Pada Periode 2016-2018*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi. Vol 5, No 1.
- Usman, Regina. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015*. *Journal of Accounting and Finance*. Vol 1 No 1.